

## **PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI DI PURWAKARTA INDONESIA**

**AE Surachman<sup>(1)\*</sup>, Sutardjo<sup>(2)</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, STIE Wibawa Karta Raharja, Purwakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen Industri, STT Wastukencana, Purwakarta, Indonesia

\*Corresponding author's e-mail: [adeelza@stiewikara.ac.id](mailto:adeelza@stiewikara.ac.id)

**Abstract.** Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sekarang ini merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi bisnis termasuk koperasi untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien dan transparan. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan dokumentasi berupa laporan keuangan koperasi. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak 66 unit koperasi di Purwakarta yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Model penelitian yang digunakan yaitu PLS-SEM dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia. Sedangkan, prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia.

### **1. PENDAHULUAN**

#### *1.1. Latar Belakang*

Berkembang fenomena saat ini bahwa koperasi simpan pinjam sering dijadikan praktik investasi bodong. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penggalangan dana masyarakat dalam jumlah besar dengan menggunakan badan hukum koperasi. Dalam perkembangannya kemudian, masyarakat menjadi korban ketika pengelola investasi tersebut melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan [1].

Munculnya kasus-kasus jeratan bisnis investasi bodong berkedok koperasi atau lembaga usaha keuangan tersebut mengesankan bahwa kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan otoritas jasa keuangan tidak memberikan aspek perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah seolah membiarkan keberadaan koperasi abal-abal yang memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan anggotanya [1].

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, pasal 17 [2]. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anggota dan tidak melanggar terhadap prinsip koperasi yang telah ada, maka diperlukan pengembangan tata kelola yang baik. Sehingga, GCG menjadi salah satu cara untuk menjaga, melindungi dan mensejahterakan para anggotanya.

GCG sangat penting untuk diterapkan agar koperasi mempunyai nilai dan sumber-sumber daya koperasi termanfaatkan secara baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran, minimalisasi pemborosan dan penyimpangan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas organisasi [3]. Namun, hingga kini belum ada peraturan tetap dari pihak regulator mengenai kejelasan aturan penggunaan GCG pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian KUKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep tata kelola koperasi yang baik.

Pada tahun 2016 koperasi di Purwakarta yang terdaftar memiliki nomor induk koperasi yaitu sebanyak 549 unit koperasi [4]. Berikut ini disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar koperasi di Purwakarta Indonesia

Keterangan	Jumlah unit koperasi	Persentase jumlah unit koperasi
Koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan	483 unit	88%
Koperasi yang melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan	66 unit	12%
Jumlah Koperasi yang terdaftar memiliki nomor induk koperasi	549 unit	100%

Sumber: Data diolah 2018 [4]

Pengurus koperasi memiliki kewajiban diantaranya adalah menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kemudian laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ditandatangani oleh semua rapat pengurus [2]. Berdasarkan tabel 1, tanggung jawab koperasi dalam melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Purwakarta masih rendah. Koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan yaitu 483 unit koperasi (88%). Sedangkan sisanya hanya 66 unit (12%) koperasi yang melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi [2]. Sehingga, perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik terhadap koperasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab kepada para anggotanya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan koperasi, sehingga tanggung jawab koperasi dalam melaksanakan rapat anggota tahunan dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung [5].

### *1.2. Tujuan khusus penelitian*

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung pengaruh tranparency, accountability, responsibility, independency, kemudian fairness terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

*Corporate Governance is a set of rules that govern the relationship between shareholders, managers of the company, creditors, government, employees and other internal and external stakeholders related to their rights and obligations, or in other words, a system that regulates and controls the company* [6].

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) [7].

1. *Transparency*. Dalam menjaga obyektivitas menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Accountability*. Setiap perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibility*. Perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independency*. Dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness*. Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Ada beberapa aspek untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yaitu: (1) aspek permodalan, diukur dengan rasio modal sendiri dengan total aset. (2) aspek kualitas aktiva produktif, diukur dengan rasio volume pinjaman terhadap anggota dengan volume pinjaman yang diberikan. (3) aspek efisiensi, diukur dengan rasio beban usaha terhadap sisa hasil usaha kotor. (4) aspek likuiditas, diukur dengan rasio kas. (5) aspek kemandirian dan pertumbuhan, diukur dengan rasio rentabilitas aset [8].

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini koperasi yang beralokasi di Purwakarta.

### 3.2. Jenis dan sumber data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari kuesioner yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang dipelajari: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness and financial performance. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan koperasi dan studi penelitian sebelumnya yang telah diringkaskan dalam jurnal penelitian yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti.

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang terdaftar memiliki nomor induk koperasi pada tahun 2016 di Purwakarta yaitu sebanyak 549 unit. Sedangkan, teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kemudian koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan adalah sebanyak 483 unit. Sehingga, sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 66 unit koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan pada Dinas KUKM Purwakarta.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen berupa data kuesioner dan dokumen laporan keuangan koperasi. Metode penskalaan yang dipilih adalah skala likert. Skala ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik [9]. Susunan tersebut adalah sebagai berikut:

**Table 2.** Skala Likert

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

### 3.5. Partial least squares - structural equation modeling (PLS-SEM)

PLS-SEM atau sering disebut dengan component based SEM merupakan tipe SEM yang menggunakan variance dalam proses iterasi sehingga tidak memerlukan korelasi antara indikator maupun konstruk latennya dalam suatu model struktural [10]. Partial least squares merupakan metoda analisis yang powerfull dan sering disebut juga sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi ordinary least squares regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem multikolinieritas antar variabel eksogen (Wold, 1985) yang dikutip [10]. Sehingga evaluasi terhadap model dan asumsi normalitas data tidak mensyaratkan data terdistribusi normal dan estimasi parameter dapat langsung dilakukan tanpa persyaratan kriteria goodness of fit. Selain itu, PLS-SEM juga tidak menuntut sampel dalam jumlah besar dan minimal yang direkomendasikan antara 30-100 kasus.

Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu measurement model dan Struktural model. Struktural model menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel konstruk. Sedangkan, measurement model atau outer model menunjukkan bagaimana variabel obserb merepresentasi variabel konstruk untuk diukur [10]. Oleh karena itu, PLS-SEM memiliki tujuan yaitu menguji hubungan

prediktif antar konstruk variabel dengan melihat apakah ada pengaruh antar konstruk tersebut.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Objek yang diteliti adalah koperasi yang ada di Purwakarta dengan jumlah sebanyak 66 unit koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan ke Dinas KUKM di tahun 2016.

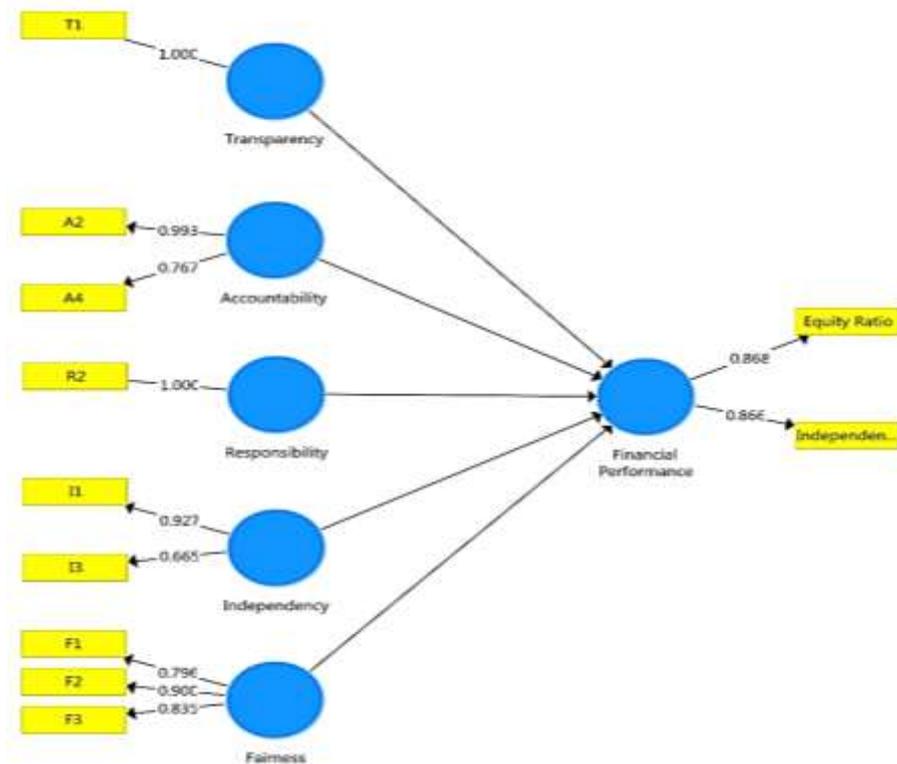
Jumlah tersebut di atas disebar terhadap setiap koperasi terdiri dari 25 pernyataan penelitian. Kuesionernya terdiri dari 20 pernyataan good corporate governance [11]. Yaitu: 4 pernyataan mewakili variabel transparansi, 4 pernyataan mewakili variabel akuntabilitas, 4 pernyataan mewakili variabel tanggung jawab, 4 pernyataan mewakili variabel independensi, 4 pernyataan mewakili variabel kewajaran; serta 5 pernyataan [8] adalah variabel kinerja keuangan koperasi.

##### 4.1. Analisis Data

###### 4.1.1. Pengujian outer model

Teknik pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Smart Partial Least Square (SmartPLS), dimana terdapat tiga kriteria untuk menilai pengukuran model konstruk reflektif yaitu *convergent validity*, *composite reliability*, serta *average variance extracted (AVE)*. [10].

Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 yang dikutip [12] untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas outer loading sebesar 0,60. Hasilnya adalah T2, T3, T4, A1, A3, R1, R3, R4, I2, I4, F4, kemudian outer loading variabel Financial Performance yang dikeluarkan dari model adalah Efficiency Ratio, Earning Asset Quality Ratio, dan Liquidity Ratio. Sekarang hasilnya telah memenuhi syarat uji convergent validity karena loading faktor di atas 0.60. Sehingga, tampilan path diagram pada tahap kedua adalah sebagai berikut.



**Figure 1.** Path algorithm diagram PLS

4.1.2. *Composite reliability and average variance extracted (AVE)*  
 Konstruk dinyatakan valid jika nilai AVE lebih besar di atas 0.5 dan konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* lebih besar di atas 0,70 [10]. Hasil dari nilai *composite reliability* dan AVE adalah sebagai berikut:

**Table 3.1.** *Composite reliability and average variance extracted (AVE)*

Variable	<i>Composite Reliability</i>	AVE
Transparency	0.88	0.79
Accountability	1.00	1.00
Responsibility	1.00	1.00
Independency	0.78	0.65
Fairness	0.88	0.71
Financial Performance	0.86	0.75

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018

Hasil output menunjukkan bahwa semua konstruk valid dan reliabel, karena nilai konstruk AVE lebih besar di atas 0.5 dan nilai konstruk *composite reliability* lebih besar di atas 0.70.

#### 4.2. *Pengujian Inner model*

Pengujian terhadap model struktural ditunjukkan dengan nilai R Square yang merupakan uji *goodness-fit model*. Model pengaruh prinsip-prinsip *good*

*corporate governance* terhadap kinerja keuangan memberikan nilai R Square 0.17. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas konstruk kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebesar 17% yang termasuk dalam kategori lemah. Sedangkan faktor lainnya yaitu 83% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

**Table 3.1.** R square

<b>Variable</b>	<b>R Square</b>
Financial Performance	0.17

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018

#### 4.3. Pengujian hipotesis

Dalam melakukan pengujian hipotesis dapat dilihat hasil t statistik dan nilai probabilitas dari pengolahan data disajikan dalam tabel 3.2 path coefficient sebagai berikut:

**Tabel 3.2.** Path coefficient

<b>Pengaruh Konstruk antar Variabel</b>	<b>T Statistics</b>	<b>P Value</b>
Transparency → Financial Performance	2,91	0,00
Accountability → Financial Performance	2,30	0,01
Responsibility → Financial Performance	1,16	0,12
Independency → Financial Performance	1,15	0,13
Fairness → Financial Performance	2.04	0.00

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018

##### 4.3.1. Pengujian hipotesis pertama

Pengaruh prinsip transparansi terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik  $2.91 > 1.65$  dengan nilai p value sebesar  $0.00 < 0.05$ , yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian hipotesis pertama mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

##### 4.3.2. Pengujian hipotesis kedua

Pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik sebesar  $2.30 > 1.65$  dengan nilai p value sebesar  $0.01 < 0.05$ , yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian hipotesis kedua mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

#### 4.3.3. Pengujian hipotesis ketiga

Pengaruh prinsip tanggung jawab terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik sebesar  $1.16 < 1.65$  dengan nilai p value  $0.12 > 0.05$ , yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian hipotesis ketiga tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [5]. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab koperasi dalam menyelenggarakan rapat anggota tahunan masih rendah.

#### 4.3.4. Pengujian hipotesis keempat

Pengaruh prinsip independensi terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik sebesar  $1.25 < 1.65$  dengan nilai p value sebesar  $0.11 > 0.05$ , yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian hipotesis keempat tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya [5]. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus tidak profesional.

#### 4.3.5. Pengujian hipotesis kelima

Pengaruh prinsip kewajaran terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik  $2.04 > 1.65$  dengan nilai p value sebesar  $0.00 < 0.05$ , yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian hipotesis kelima mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia. Sedangkan, prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia.

### References

- [1] Kemenkop & UKM, 'Pemerataan Ekonomi Langkah Prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah', *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*, pp. 1–22, 2017.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tentang Perkoperasian*. Jakarta, 1992.
- [3] Prijambodo, 'Tata Kelola yang Baik pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi', *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*, pp. 1–16, 2012.
- [4] Kemenkop & UKM, 'Nomor Induk Koperasi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah', *Nomor Induk Koperasi*, 2018. [Online]. Available: <http://nik.depkop.go.id/>. [Accessed: 23-Mar-2018].
- [5] L. G. D. A. Pradnyaswari and I. G. A. M. A. D. Putri, 'Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Koperasi di

- Kabupaten Klungkung', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 14, no. 2, 2016.
- [6] C. Cadbury, *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee and Co, 1992.
- [7] Komite Nasional Kebijakan Governance, 'Pedoman Umum Good Corporate Governance'. Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- [8] Deputi Bidang Pengawasan, *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, 2016.
- [9] U. Sekaran, *Research Methods for Business (Metode Penelitian untuk Bisnis)*, 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- [10] I. Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*, 2nd ed. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- [11] R. E. Dasuki, 'Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah', *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, Bandung, pp. 739–755, 2018.
- [12] I. Ghozali, *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

#### Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang telah memberikan saya bantuan dana hibah Kementerian ristekdikti pada skema penelitian dosen pemula untuk tahun pelaksanaan 2018.